

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta

Christy Ayu Saputri ¹, Purwono Sungkowo Raharjo²

¹²Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Policy; Licensing; Supervision
Implementation; Hotel Control;
Environmental Impact.

Kata kunci:

Kebijakan; Perizinan; Pelaksanaan
Pengawasan; Pengendalian Hotel;
Dampak Lingkungan.

Corresponding Author:

Christy Ayu Saputri , E-mail:
Christyayusap@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

The Analysis of Hotel Building Permits Supervision and Implementation in Yogyakarta. This essay focuses on state administrative law in legal study program, law faculty, UNS Surakarta. This research aims to determine (1) yogyakarta city government's policy on Supervision in Granting Implementation of Hotel Building Permits in Yogyakarta; and (2) Yogyakarta City Government's role in controlling hotel construction to minimize environmental impact. This research is a legal research empirical sociological approach. To achieve these objectives, the researcher used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that: (1) to minimize environmental impact loss caused by hotel construction, the City of Yogyakarta government issues a policy on controlling hotel construction through Yogyakarta Mayor Regulation No. 85 of 2018. The aim is to provide supervision and restrictions in granting permits for hotel construction. (2) New policy at the stage of supervision procedures for hotel construction requires cooperation between agencies namely DPMP and DPUPKP Yogyakarta City to verify field reviews, but the determination of the policy is not in line with the existing implementation so it is not effective. (3) The Environmental Permit from the Environment Agency or local authority has an important role in the process of minimizing the risk of environmental impacts. Mandatory of environmental impact assessment and UKL-UPL are one of the efforts to control and to plan that must be fulfilled by the initiator.

Abstrak

Analisis Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel Di Kota Yogyakarta. Skripsi ini berfokus pada Hukum Administrasi Negara dalam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan hotel; dan (2) Peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengendalian pembangunan hotel terkait Pengurangan Dampak Lingkungan. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum pendekatan sosiologis empiris. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) untuk meminimalkan kerugian dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembangunan perhotelan, pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan mengenai pengendalian pembangunan hotel melalui Peraturan Walikota Yogyakarta No. 85 Tahun 2018 tujuannya memberikan pengawasan dan pembatasan pemberian izin pembangunan hotel. (2) kebijakan baru pada tahap prosedur pengawasan pelaksanaan pembangunan hotel menuntut penetapan kebijakan tersebut belum sejalan dengan pelaksanaan yang ada sehingga dirasakan kurang efektif. (3) Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam proses meminimalkan risiko dampak pada lingkungan, wajib dokumen Amdal dan UKL-UPL merupakan salah satu upaya pengendalian dan perencanaan yang wajib dipenuhi oleh pemrakarsa.

I. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional Pemerintah Indonesia mendorong kebijakan otonomi daerah yaitu suatu kebijakan Pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki daerahnya¹ Pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur daerahnya untuk menyelenggarakan pembangunan yang adil dan makmur dalam segala aspek bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”².

Pemerintah Daerah kota Yogyakarta mengarahkan pembangunan daerah pada pembangunan fasilitas pelayanan publik, dan meningkatkan potensi pariwisata.³ Pembangunan yang dilakukan salah satunya dengan berinvestasi pada penyediaan jasa akomodasi yang menjadi ladang bisnis dan juga menjadi salah satu pendapatan daerah Kota Yogyakarta.⁴ Namun, pesatnya pembangunan gedung hotel yang tidak diseimbangi dengan analisis dampak lingkungan yang tepat serta tidak diiringi oleh kebijakan yang tegas oleh pemerintah daerah dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan lingkungan disekitarnya.⁵

Untuk itu Konsep pembangunan berkelanjutan diperlukan agar penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dengan menyeimbangkan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pembangunan.⁶ Tujuannya dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan dimasa mendatang, melalui penataan bangunan dan lingkungan yang tidak lepas dari rencana tata ruang yang diatur oleh pemerintah.⁷

Oleh karena itu selain Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang digunakan sebagai aturan pokok dalam pembangunan, ada kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota No 85 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, juga digunakan dalam penerapan Konsep pembangunan berkelanjutan salah satunya dengan

¹ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, ‘Politic Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice’, *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018), 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/Jeasci.2018.1430.1435>>.

² Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Sapto Hermawan, ‘Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945’, *Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.78>>.

³ Lego Karjoko, Zaidah Nur Rosidah, And I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, ‘Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah’, *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i1.42694>>.

⁴ Arif Jumari, ‘Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun’, *Bestuur*, 7.2 (2019), 11 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i2.40414>>.

⁵ Fatma Ulfatun Najicha, ‘Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations’, *International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20.4 (2019), 51–55.

⁶ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, And Lego Karjoko, ‘Regulation Of Law Enforcement In Prevention And Handling Of Fire Forests In Environmental Hazards’, *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/Mlu.V21i1.2314>>.

⁷ Lego Karjoko, Josephine Santosa, And I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, ‘Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2 (2019), 305–325. <<https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol26.Iss2.Art5>>.

kewajiban bagi para pengusaha jasa akomodasi atau pemrakarsa pembangunan gedung lainnya untuk melakukan kegiatan izin lingkungan, Amdal dan UKL-UPL.⁸ Harapannya dapat mengurangi dampak *negative* pada lingkungan sekitar. dampak *negative* pada lingkungan yang dapat terjadi seperti berkurangnya sumber air dalam, kemacetan lalu lintas, polusi udara, risiko banjir, hingga potensi bencana sosial. Krisis air dapat terjadi karena perhotelan yang dibangun di daerah padat penduduk memanfaatkan air bumi secara berlebihan sehingga mengurangi daerah resapan air disekitarnya dan merugikan masyarakat sekitar perhotelan.⁹

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu rangkaian tindakan guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Memecahkan suatu isu hukum diperlukan suatu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan menyediakan pemecahan masalah atas permasalahan tersebut.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada mempelajari dan melakukan penelitian dengan bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain meliputi buku-buku, jurnal literatur, artikel, dan bahan lain yang mendukung penelitian berkaitan dengan masalah yang diteliti dan didukung bahan non hukum berupa hasil wawancara dengan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen.¹¹

III. Pembahasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perizinan berarti suatu pernyataan persetujuan atau membolehkan atas suatu yang di larang. Sebagaimana definisi menurut Sjachran Basah izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan¹². Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan penggunaan agar tetap sesuai dengan rencana teknis pembangunan dan Rencana Tata Ruang yang berlaku. Secara umum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau renovasi suatu bangunan. Selain itu, IMB juga dapat diartikan sebagai izin

⁸ Karjoko, Rosidah, And Rahmi Handayani.

⁹ Andesgur Ivaini, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019).

¹⁰ Prof Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Penelitian Hukum*, Vi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008).

¹¹ Jumari.

¹² I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia', *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

kelayakan menggunakan bangunan (untuk bangunan yang sudah berdiri) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.¹³

Konsep pembangunan berkelanjutan atau (Sustainable Development) di Indonesia merupakan gagasan yang diadopsi dari laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau Komisi Lingkungan dan Pembangunan. Komisi Lingkungan dan Pembangunan merupakan sebuah badan yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1983.¹⁴ Dalam Laporan tahun 1987, WCED-UN mendefinisikan (*Sustainable Development*) yang dalam pustaka Indonesia diterjemahkan sebagai pembangunan berkelanjutan (*as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need*), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa mengeliminasi hak generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹⁵ Maksud dan tujuan dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah mencoba menemukan teori yang stabil, suatu kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dalam situasi apa pun di mana manusia menemukan jenis laporan - lingkungan, baik itu lingkungan, lingkungan ekonomi atau sosial lingkungan Hidup.¹⁶

Pelaksanaan Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, tidak lepas dari aparatur pemerintah sebagai organisasi pejabat yang berwenang yang memiliki stuktur birokrasi didalamnya. Dalam struktur organisasi terdapat Aspek yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat dalam standart operation prosedur atau (SOP). SOP merupakan pedoman setiap pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan aspek kedua yaitu adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi dengan prosedur birokrasi yang rumit, panjang dan kompleks menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel dan cenderung melemahkan pengawasan.¹⁷

Prosedur Izin Mendirikan Bangunan ialah serangkaian mekanisme yang harus ditempuh bagi seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan izin berdasarkan perangkat hukum yang ada.¹⁸ Melalui birokrasi pelayanan publik sebagai organisasi pada sektor publik, yang berfungsi melayani masyarakat secara langsung, diharapkan dapat memenuhi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum optimal.¹⁹

Tahapan pertama dalam penerbitan IMB adalah Pemrakarsa/pemohon mengajukan permohonan IMB berserta dokumen syarat administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan

¹³ Fatma Ulfatun Najicha And Others, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>.

¹⁴ Abdul Kadir Jaelani, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2020) <<https://doi.org/10.31941/Pj.V18i2.1090>>.

¹⁵ Ivnaini.

¹⁶ Fatma Ulfatun Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta Kl , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55.

¹⁷ Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha, 'Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat', 9860 (2016), 21–29.

¹⁸ Haris Budiman And Others, 'The Application Of Criminal Sanctions On The Distribution Of Alcoholic Drinks', *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 7 <<https://doi.org/10.20961/jmail.V1i1.44740>>.

¹⁹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani And Others, 'The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', 14.4 (2017), 225–29.

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 58, yaitu terdiri dari Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud :

- a. Formulir permohonan IMB yang diisi lengkap dan mencantumkan tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat;
- b. Fotocopy KTP pemohon (pemilik bangunan) yang masih berlaku;
- c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan lainnya yang sah;
- d. Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh pemohon (pemilik bangunan) dan pemilik tanah.

Sedangkan persyaratan teknis dalam permohonan dokumen IMB yang wajib dipenuhi oleh pemrakarsa, terdiri dari :

- 1) Advice planning
- 2) Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi:
 - 1). *Rencana tapak bangunan (site plan) yang meliputi: letak bangunan, akses jalan, parkir, penghijauan, /RTH dan lain-lain;*
 - 2). *Rencana denah bangunan, tapak depan dan samping;*
 - 3). *Rencana pondasi;*
 - 4). *Rencana atap;*
 - 5). *Gambar potongan;*
 - 6). *Rencana instalasi dan sanitasi;*
 - 7). *Gambar struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka atap baja;*
 - 8). *Tanda tangan penanggung jawab gambar;*
 - 9). *Gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis, kecuali rumah tinggal tunggal, dan rumah sederet sederhana.*
 - 10). *Rekomendasi dari instansi teknis (bila diperlukan).*
- 3) Terhadap ketinggian bangunan yang ketinggian melebihi ketentuan dalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi harus mendapatkan rekomendasi ketinggian bangunan.
- 4) Terhadap bangunan cagar budaya, bangunan yang berada di kawasan cagar budaya dan bangunan yang berada pada garis sempadan sungai memerlukan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
- 5) Kajian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan dalam prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tersebut, baik penerbitan dan pencabutan merupakan kewenangan dibawah Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (DPMP).

Latar belakang dari dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan yang bertujuan untuk mengendalikan pembangunan hotel yaitu²⁰:

- a) Mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif sempit;
- b) Sebagai bahan kajian untuk menetapkan jumlah kebutuhan hotel di Kota Yogyakarta dan;
- c) Adanya keresahan masyarakat disekitar pembangunan hotel akibat dari dampak lingkungan pembangunan hotel.

Kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pembangunan

²⁰ Baharrudy Isa Aulia Fatma And Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Solo Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 25–30.

Hotel.²¹ Pengendalian hotel yang maksud dalam kebijakan tersebut adalah adanya larangan untuk mendirikan atau membangun hotel baru, bukan dalam hal pengembangan hotel yang sudah ada.²² Selain itu, Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yaitu dengan menghentikan sementara pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan hotel baru di daerah. Penghentian sementara pelayanan permohonan izin dikecualikan pada²³:

- a) Pengembangan hotel yang sudah mempunyai IMB sebelumnya;
- b) Pembangunan hotel bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima);
- c) Pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta; dan
- d) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan menjadi bangunan untuk usaha penyediaan akomodasi selain hotel.

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Hotel :

a. Sumber daya

Sumber daya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan keterampilan, keahlian, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas diukur dari segi jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.²⁴ Sumber daya penting lainya yaitu Anggaran yang mana anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, dikarenakan tanpa adanya anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan. Kejelasan informasi juga memberikan peran penting dalam terlaksananya kebijakan yaitu dengan memberikan informasi yang relevan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.²⁵

Selain itu, sumber daya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dengan Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, peralatan perkantoran, sarana yang memadai akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

b. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan adanya kejelasan Informasi yang menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama pada informasi yang relevan terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sosialisasi atau penyuluhan adalah salah satu bentuk pemberian informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

c. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia yang normal, namun pada permasalahannya ialah taraf kesadaran hukum masyarakat tersebut. Taraf kesadaran hukum

²¹ Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta Kl , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N'.

²² Eko W Purwanto, 'Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, 4.2 (2020), 207–14 <<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.111>>.

²³ Ulfa Nur Oktiana, Waluyo, And Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16–24.

²⁴ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, And Others, 'The Construction Of Law System In The Field Of Environmental Governance In Realizing Justice And Green Legislation In Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38.

²⁵ Rezi Budiningtyas Ambarwati And Waluyo, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15.

seseorang dapat dinilai berdasarkan indikator mulai dari yang rendah sampai tinggi, diantaranya yaitu dapat dinilai dari ; pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan Pola Perilaku Hukum.²⁶

IV. Penutup

Pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengacu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 85 Tahun 2018 mengenai pengendalian hotel. Namun kebijakan pengendalian hotel tersebut hanya berlangsung sementara dan akan berakhir. selain itu, pemerintah Kota Yogyakarta nampaknya belum memprioritaskan mengenai batasan pembangunan perhotelan. Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan perizinan bangunan gedung hotel di Kota Yogyakarta dipengaruhi dari berbagai Faktor-Faktor diantaranya; “1). *Sumber daya* 2). *Komunikasi* 3). *Kesadaran Masyarakat*”

V. References

- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, And Waluyo, ‘Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo’, *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 9–15
- Balenina, C.D., ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>>
- Budiman, Haris, Ela Nurlaela, Diding Rahmat, And Suwari Akhmaddhian, ‘The Application Of Criminal Sanctions On The Distribution Of Alcoholic Drinks’, *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1.1 (2020), 7 <<https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44740>>
- Dewi, Septya Hanung Surya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, And Fatma Ulfatun Najicha, ‘Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat’, 9860 (2016), 21–29
- Fatma, Baharrudy Isa Aulia, And Pius Triwahyudi, ‘Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Solo Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta’, *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 25–30
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I. Gusti Putu Diva Awatara, And Fatma Ulfatun Najicha, ‘Politik Of Legislation In Indonesia About Forestry And The Mining Activity Permit In The Forest Area Of Environmental Justice’, *Journal Of Engineering And Applied Sciences*, 13.6 (2018), 1430–35 <<https://doi.org/10.3923/jeasci.2018.1430.1435>>
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, And Fatma Ulfatun Najicha, ‘Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia’, *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, And Fatma Ulfatun Najicha, ‘The Regulatory Formulations Of Central Java And East Java Watershed: Strengthening Local Government In Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation’, 14.4 (2017), 225–29
- Ivnaini, Andesgur, ‘Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida’,

²⁶ C.D. Balenina, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>>.

- Bestuur*, 7.2 (2019)
- Jaelani, Abdul Kadir, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2020) <<https://doi.org/10.31941/Pj.V18i2.1090>>
- Jumari, Arif, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Bestuur*, 7.2 (2019), 11 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i2.40414>>
- Karjoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, And I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.20961/Bestuur.V7i1.42694>>
- Karjoko, Lego, Josephine Santosa, And I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2 (2019), 305–325. <<https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol26.Iss2.Art5>>
- Marzuki, Prof Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum*, Vi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008)
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta Kl , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- , 'Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', *International Journal Of Business, Economics And Law, Vol. 20, Issue 4 2019*, 20.4 (2019), 51–55
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, And Lego Karjoko, 'Regulation Of Law Enforcement In Prevention And Handling Of Fire Forests In Environmental Hazards', *Medico-Legal Update*, 21.1 (2021), 259–62 <<https://doi.org/10.37506/Mlu.V21i1.2314>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, And Rintis Nanda Pramugar, 'The Construction Of Law System In The Field Of Environmental Governance In Realizing Justice And Green Legislation In Indonesia', 24.07 (2020), 8629–38
- Oktiana, Ulfa Nur, Waluyo, And Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 16–24
- Purwanto, Eko W, 'Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, 4.2 (2020), 207–14 <<https://doi.org/10.36574/Jpp.V4i2.111>>
- Ulfatun Najicha, Fatma, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Hartiwiningsih A, And Lego Karjoko, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/Ijar01/10424>>
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, And Spto Hermawan, 'Law In The Globalization And Its Influence On Economic Development And Environmental Preservation Based On Pancasila And The Indonesian Constitution Of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference On Globalization Of Law And Local Wisdom (Icglow 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/Icglow-19.2019.78>>